JURNAL EL TARIKH
JOURNAL OF HISTORY, CULTURE AND CIVILIZATION
Department of Historical Islamic Civilization Faculty of Adab
UIN Raden Intan Lampung

P-ISSN: 2774-7999 E-ISSN: 2774-8723
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/eltarikh/index
DOI: http://dx.doi.org/10.24042/jhcc.v3i2.9267

Dinamika Nu Pasca Kemerdekaan Menuju Ditetapkannya Khittah Nu Sebagai Keputusan Muktamar Situbondo 1945-1984

Post-Independence NU Dynamics Towards the Establishment of the NU Outline as a Decision of the Situbondo Congress 1945-1984

Ikmal Fawaid[*1]
[*1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Coresponding author: ikmalfawaid2@gmail.com
Submit: 24 Juni 2021 Revised: 11 November 2022 Accepted: 15 November 2022 Published: 30 November 2022

Abstract

This article aims to figure out the dynamics and social processes that experienced by NU in the period 1945-1984 until it decided to withdraw from practical politics in 1984. The reasons why NU do that decision will be found by elaborate those subjects. Meanwhile NU has been involved in practical politics for 39 years. It means that decision is not easy to accept immediately and create a big impact on both NU itself as an organization and other parties which bring interest in NU. It takes time to rearrange the organization with a large number of members. Furthermore, this article uses the historical method in the process. The steps of that methd are: topic selection, sources collecting, verification, interpretation, and historiography. Then, based on the research that has been carried out, this article finds that NU has experienced various things that are detrimental to it by being continuously involved in practical politics because it is involved in repeated and endless disputes. So, NU's withdrawal from practical politics is a based decision.

Keywords*: The Dynamics of The NU, Social Processes, The Khittah of The NU.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menelusuri dinamika dan proses sosial yang dialami oleh NU pada periode 1945-1984 hingga memutuskan untuk menarik diri dari politik praktis pada tahun 1984. Dengan menguraikan hal tersebut akan ditemukan alasan-alasan yang menyebabkan keputusan itu akhirnya diambil oleh NU. Padahal NU sendiri sudah terlibat dalam politik praktis selama 39 tahun. Hal ini memiliki arti bahwa keputusan tersebut tidak mudah untuk diterima seketika dan membawa dampak yang besar baik terhadap NU sendiri sebagai organisasi maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap NU. Perlu waktu menata ulang organisasi dengan jumlah anggota yang banyak. Selanjutnya artikel ini menggunakan metode sejarah dalam proses pengerjaannya. Adapun tahapan-tahapannya sebagaimana berikut: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Kemudian berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan artikel ini menemukan bahwa NU mengalami berbagai hal yang merugikannya dengan terlibat secara terus menerus dalam politik praktis karena terlibat dalam pertikaian yang berulang dan tiada habisnya. Oleh karena itu, penarikan diri NU dari politik praktis merupakan keputusan yang memiliki dasar.

Kata kunci: Dinamika NU, Poses Sosial, Khittah NU.

PENDAHULUAN

Muktamar Situbondo tahun 1984 menetapkan Khittah NU sebagai keputusan muktamar (Muzadi, 2006). Salah satu poin penting dari Khittah NU yang mendapatkan cukup banyak perhatian adalah penarikan diri NU dari politik praktis (Feillard, 2017). Keputusan tersebut semakin penting dan berdampak besar karena diambil dalam perhelatan muktamar yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam tradisi NU (Shodiq, 2004). Meskipun sudah menjadi keputusan muktamar, penarikan diri NU dari politik praktis tersebut masih menyisakan pro dan kontra. Apalagi dengan begitu banyaknya jumlah anggota, dimana dengannya dapat dipastikan bahwa NU bukanlah organisasi monolitik yang memiliki suara tunggal (Fealy, Wahab Chasbullah, Tradisioalisme, dan Perkembangan Politik NU, 1997) (Bashri, 2020). Banyaknya jumlah anggota serta kemajemukan yang ada sering memunculkan ragam pandangan dari sisi internalnya sekaligus menarik pihak dari luar yang memiliki kepentingan terhadap NU untuk mempengaruhi setiap keputusan yang akan dibuat (Fealy, 1997).

Sebelumnya, NU memang terlibat aktif dalam politik praktis. Awalnya NU terlibat aktif di dalam Partai Masyumi 1945-1952 yang didirikannya bersama dengan komponen Islam lainnya. Kemudian NU memisahkan diri dari Partai Masyumi sekaligus merubah dirinya menjadi partai independen yaitu Partai NU pada periode 1952-1973. Terakhir, sebelum mengundurkan diri dari politik praktis, NU juga sempat tergabung dalam PPP 1973-1984 bersama tiga partai Islam yang lain sebagai akibat dari kebijakan fusi partai oleh pemerintahan Orde Baru (Bruinessen, 1994). Hal itu berarti bahwa NU sudah terlibat dalam politik praktis selama 39 tahun, yaitu pada kurun 1945-1984. Waktu yang relatif lama untuk membentuk kemapanan pola pikir dan kerja organisasi menjadi kental dengan aroma partai politik. Hal ini sekaligus dapat memberi gambaran bahwa betapa penarikan diri NU dari politik praktis merupakan keputusan yang besar dan begitu berdampak terhadap organisasi.

Periode	Keterangan
1945-1952	NU bersama komponen Islam yang lain mendirikan dan terlibat langsung dalam Partai Masyumi.
1952-1973	NU memisahkan diri dari Partai Masyumi dan mendeklarasikan diri sebagai Partai NU.
1873-1984	NU Bergabung dalam PPP bersama tiga partai Islam yang lain.
1984	NU menetapkan Khittah NU sebagai keputusan Muktamar Situbondo dan menarik diri dari politik praktis.

Tabel 1: garis besar perjalanan NU pada periode 1945-1984.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menelusuri apa yang dialami oleh NU pada periode 1945-1984 hingga memutuskan untuk menarik diri dari politik praktis pada tahun 1984. Padahal dengan keterlibatan NU dalam politik praktis membuat peluang untuk merebut kekuasaan dan menempatkan para kadernya pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan secara langsung masih tetap terbuka. Apakah keputusan tersebut tidak merugikan NU ataukah malah menguntungkannya? Guna menindak lanjuti hipotesis tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan berikut ini untuk kemudian dicari jawabannya melalui berbagai penelusuran: 1. Bagaimana dinamika dan proses sosial yang terjadi hingga mendorong NU memutuskan untuk menarik diri dari politik praktis? 2. Mengapa keputusan penarikan diri dari politik praktis tersebut pada akhirnya diambil oleh NU?

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Artikel yang merupakan kajian kepustakaan ini menggunakan metode sejarah yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo dalam proses pengerjaannya. Diharapkan dengan metode sejarah

tersebut, artikel ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebagai rumusan masalah. Berikut ini lima tahapan dari metode sejarah tersebut: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Sementara kajiannya difokuskan pada pembahasan tentang NU yang memutuskan untuk menarik diri dari politik praktis pada tahun 1984 dan menelusuri latar belakang historis dari pengambilan keputusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika NU dalam Partai Masyumi: 1945-1952

NU bersama dengan kelompok Islam yang lain mendirikan Partai Masyumi pada bulan November 1945 (Bruinessen, 1994) (Fealy, 2009). Pendiriannya dilaksankan melalui Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7 dan 8 November 1945 yang dihadiri hampir seluruh tokoh dari berbagai organisasi Islam. Hal itu dilakukan sebagai reaksi atas pengumuman pemerintah pada 3 Oktober 1945 agar rakyat mendirikan partai (Noer, 1987) dalam rangka membangun demokrasi multi-partai di Indonesia (Fealy, 2009). Sejak saat itulah NU resmi berpolitik praktis. Partai Masyumi memiliki keanggotaan yang bersifat kolektif dan individual. Anggota kolektif awalnya antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat. Setelah itu juga terdapat organisasi-organisasi Islam lain yang turut bergabung setelah didirikan kembali, mereka antara lain Persatuan Islam (Bandung) yang bergabung pada 1948, Al-Irsyad (Jakarta) yang bergabung pada 1960, dan beberapa organisasi Islam lain yang menjadikan dirinya sebagai cabang Partai Masyumi di daerah (Noer, 1987). Dari beberapa kelompok tersebut tidak perlu waktu lama untuk saling mengenal karena sebelumnya mereka memang sudah pernah berinteraksi melalui pergumulannya dalam kongres Al-Islam 1922-1926, MIAI 1937-1943, dan Masyumi 1943-1945 (Bruinessen, 1994) yang tentunya membuat mereka menjadi sudah saling tahu tentang perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok.

Awalnya hal-hal semacam itu tidak menjadi masalah bagi NU karena posisi yang diberikan Partai Masyumi bagi tokoh-tokoh NU merupakan posisi-posisi penting yang cukup punya potensi untuk mewarnai haluan politik Partai Masyumi (Ida, 1996). Hal itu berubah ketika kepengurusan partai kedua terbentuk melalui Kongres Partai Masyumi di Yogyakarta pada 1949. Hanya dua orang NU yang menjadi pengurus eksekutif yaitu KH. Wahid Hasyim dan Zainul Arifin (Noer, 1987) dan peran Majelis Syura yang kepemimpinannya sejak awal diserahkan kepada KH. Hasyim Asy'ari hingga wafat pada 25 Juli 1947 dirubah hanya menjadi penasehat saat kepemimpinannya dilanjutkan oleh KH. Wahab Chasbullah. Selain perubahan posisi yang diterima NU, peran Majelis Syura tersebut juga berkurang dibandingkan sebelumnya yang menjadi semacam badan legislatif dengan peran yang relatif setara dengan pengurus eksekutif (Noer, 1987) (Bruinessen, 1994) (Fealy, 1997).

Masalah struktur dan organisasi selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai dari kongres ke kongres. Sejak berdirinya Partai Masyumi hingga saat akan bubar 1945-1960. Ide dualisme keanggotaan yang diterapkan partai, salah satunya didasarkan pada pertimbangan untuk memperbanyak jumlah anggota. Hal itu dapat dipahami sebagaimana lazimnya perilaku partai politik manapun, Partai Masyumi tentu juga memiliki kepentingan untuk memperbanyak anggota agar menjadi partai politik terdepan dalam hal perolehan suara ketika nantinya dilaksanakan pemilu. Selain hal tersebut, masalah kepentingan dan perbedaan nilai dasar yang dianut oleh masing-masing komponen partai menjadikan persoalan yang ada semakin rumit. Apalagi kebijakan Partai Masyumi yang sering dipengaruhi oleh pribadi pengurusnya (Alrianingrum, 2014).

NU dalam berbagai interaksinya pernah terlibat dalam beberapa persaingan. Sebagai kelompok tradisionalis, persaingan tersebut sering terjadi dengan kelompok reformis-modernis pada 1920-an

dan 1930-an (Fealy, 2009). Hal itu kembali terulang saat NU tergabung dalam Partai Masyumi (Sumarno, 2015). Porsi peran NU yang diminimalisir oleh Partai Masyumi sebagaimana disebut sebelumnya diperkeruh dengan pernyataan kelompok Natsir yang tengah berkuasa bahwa Kyai tidak tepat mengemban peran politik. Sementara saat itu komponen NU masih terbatas pada para Kyai, sehingga pernyataan tersebut dinilai oleh NU memiliki niat yang tidak baik terhadapnya. Selain itu usulan agar Partai Masyumi menjadi badan federasi juga ditolak, padahal hal itu penting bagi NU yang keanggotannya bersifat kolektif dimana bobot utusan NU yang mewakili ratusan atau ribuan pendukung disamakan dengan suara anggota perseorangan (Fealy, 2009). Terdapat juga pandangan yang berbeda dari NU yang tidak setuju dengan Partai Masyumi terkait sikap politik luar negerinya yang pro-barat dan sikap politik keagamaannya yang sepertinya cenderung pro-Kartosuwiryo DI/TII (Sumarno, 2015). Padahal sebenarnya NU sejak awal sudah menunjukkan komitmennya terhadap Partai Masyumi. Muktamar NU Purwokerto 1946 bahkan menyerukan kepada warga NU untuk berbondong-bondong masuk Partai Masyumi. Namun, NU akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Partai Masyumi pada 1952. Hal itu disebabkan karena hubungan NU dan Partai Masyumi tidak pernah pulih sejak Kongres Partai Masyumi 1949. Kemarahan yang meluas terhadap keputusan kongres mendorong dilakukannya kampanye penarikan diri dari Partai Masyumi oleh kelompok-kelompok di dalam NU. Meskipun begitu, upaya penarikan diri tersebut masih menjadi perdebatan dalam Muktamar NU 1950 yang sebagian besar pesertanya memberi penilaian bahwa terlalu dini untuk memisahkan diri dari Partai Masyumi. Sebagai respon sekaligus peringatan terhadap situasi yang terjadi di dalam Partai Masyumi, Muktamar tersebut melakukan repetisi terhadap usulannya agar Partai Masyumi berubah bentuk menjadi badan federasi. Pada tahun berikutnya 1951, secara diam-diam, PBNU membentuk Majelis Pertimbangan Politik yang diketuai oleh KH. Mohammad Dachlan. Tugasnya adalah memberikan nasehat perihal masalah politik sehari-hari terhadap PBNU sekaligus menyusun rencana bagi NU untuk menjadi partai politik (Fealy, 2009).

Partai NU dan Pergumulannya: 1952-1973

Rentetan pertikaian antara NU dan Partai Masyumi tersebut dapat dinilai sebagai proses penyesuaian ulang. Namun norma-norma baru yang dibangun kelompok Natsir pada 1949 tidak bisa diterima oleh NU karena dinilai merugiakannya. Pertikaian termasuk salah satu bentuk proses sosial yang merupakan siklus dalam hubungan sosial. Sebenarnya pertikaian dapat menata ulang keseimbangan jika dapat diselesaikan dengan baik, namun perbedaan kepentingan dan usaha masing-masing untuk memenuhi tujuan yang berseberangan dan tidak ditemukannya penyelesaian atas persoalan yang ada (Abdulsyani, 2002) cenderung mengarahkan NU pada pemisahan diri dari Partai Masyumi. Terlebih solidaritas (Scott, 2013) antara NU sebagai kelompok tradisionalis dengan kelompok modernis di dalam Partai Masyumi belum terbentuk secara kuat. Latar belakang pendidikan dan budaya masing-masing kelompok yang berbeda juga menyebabkan munculnya perbedaan cara pandang terhadap realitas yang sedang dihadapi. Pemimpin Partai Masyumi juga dinilai tidak cakap untuk melakukan negosiasi dengan sesama anggota. Salah satu akibatnya adalah pemisahan diri NU sebagai salah satu anggotanya (Alrianingrum, 2014). Di sisi lain, saat itu superordinasi (Johnson, 1994) NU tengah dipegang oleh Syuriah yang dipimpin oleh KH. Wahab Chasbullah sebagai Rais Am yang memang sejak beberapa tahun sebelumnya sudah menghendaki NU memisahkan diri dari Partai Masyumi (Fealy, 1997). Oleh karena itu dapat dipastikan jalan menuju pemisahan diri tersebut semakin terbuka, meski sebenarnya masih terdapat kalangan di dalam NU yang tidak menghendakinya. Namun proses legitimasi (Berger, 1991) yang terjadi lebih mengarahkan NU pada pemisahan diri. Melalui Muktamar ke-19 Palembang pada 26 April-1 Mei 1952 akhirnya NU memutuskan berpisah dengan Partai Masyumi dan sekaligus mengubah dirinya menjadi partai politik tersendiri (Feillard, 2017) (Bashri, 2020). Mulai saat itu keterlibatan NU dalam politik praktis tidak memakai embel-embel nama lain sebagai wadah dan setiap keputusan di

wilayah eksternal partai tentu sudah tidak melalui proses perdebatan dengan kelompok Islam lain seperti saat masih tergabung dalam Partai Masyumi.

Selama proses transformasinya, Partai NU mengalami masa keterabaian dan ketidak aktifan. Jumlah anggotanya menurun dari 100.000 lebih di awal 1940-an menjadi 51.000-an pada 1952. Keaktifan cabangnya juga menurun dari 120 menjadi di bawah 100 (Fealy, 2009). Untuk mengatasi hal semacam itu, Partai NU perlu menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dan jika berniat memiliki pengaruh yang lebih luas, Partai NU juga perlu mengembangkan diri serta memperbesar potensi pengaruhnya dengan cara memasukkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di luar lingkungannya (Nottingham, 1985). Terlebih dengan keadaan partai yang baru dibangun dan masih minim tenaga ahli di luar bidang keagamaan. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan dengan cepat sebagai tindakan oleh para agen (Scott, 2013) Partai NU jika hendak merambah bidang yang lebih luas oleh karena adanya kemungkinan pemilu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu tahun 1953 (Fealy, 2009), meski akhirnya baru dilaksanakan tahun 1955. Rentang waktu yang relatif pendek jika dirunut sejak NU berubah menjadi partai politik. 70% dari sepuluh juta anggota Partai Masyumi merupakan anggota dan simpatisan NU. Pendapat para pemimpin Partai NU tersebut perlu ditindak lanjuti dengan berbagai usaha untuk menarik kembali dukungan mereka (Fealy, 1997) (Fealy, 2009). Usaha yang dilakukan tentu melalui persaingan dengan Partai Masyumi. Keduanya telah melakukan perjanjian yang memberi kesempatan bagi para anggotanya untuk memilih bergabung dengan Partai NU atau Partai Masyumi hingga 31 Oktober 1952. Setelah tenggal tersebut terlalui, para anggotanya tidak diperkenankan untuk memiliki keanggotaan ganda. Berbagai rayuan dilakukan dengan cara mengirimkan warta berkala serta delegasi ke cabang-cabang organisasi tradisionalis dan melobi anggota-anggota berpengaruhnya sembari memberikan tawaran yang menguntungkan jika bergabung dengan partainya (Fealy, 2009).

Partai NU menawarkan konsep dan nilai-nilai tradisionalisme (Scott, 2013) yang dianutnya. Hal itu dilakukan agar terlihat kontras antara partainya dengan Partai Masyumi. Namun dibandingkan tawaran-tawaran yang diberikan, pilihan untuk berpihaklah yang cenderung lebih berpengaruh. Di daerah yang para Kyainya memihak Partai NU, keanggotaan dan keaktifannya meningkat pesat. Sementara di daerah yang para Kyainya tetap memilih Partai Masyumi, Partai NU menjadi sulit berkembang. PBNU pernah membuat pernyataan resmi bahwa partainya mengalami peningkatan jumlah anggota yang pesat pada periode 1952-1955. Pada Muktamar NU 1954 di Surabaya terdapat 200 cabang yang terwakili. Sebaliknya Partai Masyumi diberitakan mengalami penurunan jumlah anggota secara drastis pada periode yang sama. Namun usaha tersebut dinilai tidak berjalan terlalu mulus karena masih terdapat beberapa Kyai kenamaan dan berpengaruh masih tetap memilih Partai Masyumi, misalnya Kyai Abdullah Syafi'i dari Jakarta dan Kyai Karim Hasyim, putra KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi caleg dari Partai Masyumi pada pemilu 1955 (Fealy, 2009). Partai NU kemudian juga membentuk beberapa perangkat organisasi baru. Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah anggota yang pesat dan kebutuhan umat terhadap kalangan tertentu. Saat memutuskan menarik diri dari Partai Masyumi, NU baru memiliki Ansor, Muslimat yang mencakup Fatayat, dan Pertanu selain Lembaga Dakwah, Ma'arif, Mabarrat, dan Keuangan. Sementara yang baru didirikan pada periode 1953-1955 antara lain Ikabepi didirikan April 1954 yang langsung mendapat pendukung dari mantan pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang mengaku punya 200.000 anggota pada 1956, Sarbumusi didirikan September 1955 yang mampu menghimpun dukungan dari angkatan kerja tradisionalis di bidang industri pertanian seperti gula, tembakau, padi, transportasi, dan pelabuhan. Sayangnya tidak satu pun yang berfungsi efektif di tingkat nasional dan semua administrasinya berantakan dan kekurangan dana. Keuntungan jangka panjang diperoleh dari IPNU dan IPPNU yang didirikan pada awal 1954 karena

menjadi wadah pelatihan bagi para kader NU yang kelak menempati posisi dalam kepengurusan partai pada era 1960-an. Selain itu Partai NU juga menerbitkan beberapa media cetak. Gema Muslimin pada Maret 1953, harian Duta Masyarakat pada Januari 1954, dan Risalah Politik pada Juni 1954. Media-media tersebut tentu dapat digunakan sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi terhadap setiap hal yang berkaitan dengan partai, meskipun media-media tersebut dinilai masih berkualitas rendah jika dibandingkan dengan media-media pesaing yang diterbitkan oleh kelompok lain. Hal itu merupakan cerminan bahwa masih terdapat kekurangan dana dan penulis yang dimiliki Partai NU (Fealy, 2009).

Terlepas dari semua persoalan tersebut, secara politik Partai NU dapat dinilai berhasil. Partai NU menempati posisi ketiga pada pemilu 1955 dengan perolehan suara 18,4% suara. Kursi dewan yang diperoleh meningkat dari 8 kursi menjadi 45 kursi (Feillard, 2017). Dengan perolehan suara tersebut, Partai NU yang minim tenaga ahli di luar bidang keagamaan akhirnya memutuskan merekrut beberapa orang luar. Mereka antara lain: ekonom Prof. Sunarjo, pengacara Mr. Sunarjo, Burhanuddin, produser film Djamaluddin Malik, sutradara film Asrul Sani dan Usmar Ismail. Pada 1956 dua pengusaha Tionghoa bernama Hasan Tan Kiem dan Tan Eng Hong juga direkrut. Rekrutmen politik tersebut selain digunakan untuk mengisi kekosongan tenaga ahli juga untuk menjembatani Partai NU dengan lingkungan di luarnya seperti lingkungan politik, bisnis, dan militer. Dari semua hasil rekrutmen tersebut, terdapat nama yang paling menonjol pada 1950-an dan 1960-an yaitu Subhan ZE, seorang intelektual dan pengusaha muda yang mempunyai koneksi dengan pihak militer (Bruinessen, 1994).

Pada periode 1957-1960 Presiden Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat mengubah sistem negara menjadi demokrasi terpimpin (Fealy, 1997). Pendapat Partai NU terhadap demokrasi terpimpin terbagi antara menerima dan menolak. Di satu pihak, KH. Wahab Chasbullah menerima bahkan mendukungnya. Selain itu beberapa pemimipin seperti Masjkur, Idham Chalid, Zainul Arifin, Saifudin Zuhri, dan Ahmad Sjaichu juga mudah beradaptasi dengan demokrasi terpimpin. Sementara di sisi lain juga terdapat pihak yang secara tegas menolak yaitu KH. M. Dachlan dan Imron Rosyadi serta Kyai Bisri Syansuri dan Kyai Achmad Siddiq. Perdebatan tersebut diakhiri dengan pemberian kebebasan bagi para calon dari Partai NU dalam kabinet Gotong Royong untuk menerima atau menolak penunjukannya berdasarkan keyakinan mereka karena keduanya juga telah mendapat legitimasi keagamaan dari para Kyai. Boleh menerima dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar sekaligus menjaga iman dan juga partai, atau menolak dengan alasan jika penerimaan dilakukan maka hukumnya adalah ghasab karena terdapat hasil sah pemilu 1955 yang dirubah presiden melalui dekrit 5 Juli 1959 yang berarti hak pengambilan keputusan telah dipakai tanpa izin dari pemilik hak suara yang lain. Dari 57 calon Partai NU hanya 3 yang memilih untuk menolak, selebihnya menerima kedudukan yang diberikan (Fealy, 2009). Pembubaran Partai Masyumi pada September 1960 membuat Partai NU menjadi satu-satunya wakil partai Islam terbesar dan utama dalam Nasakom, meski pengaruhnya termasuk PNI semakin berkurang karena kekuasaan semakin terpusat pada presiden yang sekaligus menjadi perdana menteri, tentara, dan PKI (Fealy, 1997).

Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an Partai NU mengalami reproduksi identitas kultural. Bentuknya berupa perubahan budaya organisasi dan kepemimpinan. Hal itu menjadi konsekuensi dari proses sosial yang dilalui atas keterlibatannya dalam politik praktis. Selain itu, komposisi NU yang semakin heterogen juga mengubah cara pandang dan aspirasinya sehingga berdampak cukup besar terhadap peran dan persepsi diri Partai NU pada pertengahan 1960-an (Fealy, 2009). Memang saat proses sosial sedang berlangsung akan terlihat proses terjadinya superordinasi dan subordinasi budaya yang dinamis, sementara pada tataran individual biasanya muncul proses resistensi ketika reproduksi identitas kultural sedang terjadi dalam konteks sosial budayanya. Proses adaptasi tersebut berkaitan dengan dua aspek yaitu ekspresi kebudayaan dan pemberian makna terhadap tindakan-tindakan individual. Dengan kata lain, hal itu terkait dengan cara apa sekelompok

manusia dapat mempertahankan identitasnya di dalam lingkungan sosial budaya yang berbeda (Abdullah, 2015).

Proses reproduksi tersebut dipercepat dengan terjadinya berbagai perubahan. Wujud dari perubahan tersebut terjadi antara lain dengan bentuk pola baru dalam rekrutmen, pelatihan kader, kemunculan pemimpin dari generasi baru, serta kader baru NU yang berasal dari keluarga Kyai, politisi, dan tokoh dari daerah. Latar belakang mereka cenderung berbeda dengan kebanyakan pendahulunya yang merupakan lulusan pesantren. Generasi baru ini memiliki pengalaman belajar di sekolah umum dan semakin banyak yang melanjutkan belajarnya di perguruan tinggi untuk belajar di bidang hukum, ekonomi, seni, jurnalisme, dan kedokteran. Mereka juga lebih menguasai bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab yang membawanya lebih dekat dengan wacana intelektual Barat dibanding pengetahuan Islam klasik. Selain itu mereka adalah angkatan pertama yang menikmati beasiswa dari luar negeri dan perjalanan ke luar negeri sebagai anggota Partai NU yang memiliki potensi dan koneksi. Contoh pemimpin generasi baru tersebut adalah Mahbub Djunaidi, Chalid Mawardi, dan Said Budairy. Ketiganya berasal dari keluarga tokoh NU. Mahbub Djunaidi merupakan putra KH. Moh. Djunaidi, ketua umum NU Jakarta dan pejabat senior di Departemen Agama. Chalid Mawardi berasal dari keluarga Kyai di Solo serta putra dari Mahmudah Mawardi yang lama aktif sebagai anggota parlemen dan ketua Muslimat NU. Said Budairy merupakan putra dari ketua NU Malang dan cucu dari KH. Murtadho yang menjadi wakil NU dalam Dewan Konstituante. Selain itu juga terdapat hasil rekrutmen lain yang semakin beragam, dimana hal itu sekaligus menunjukkan bahwa perubahan memang sedang terjadi. Partai NU juga membentuk organisasi-organisasi baru yang berafiliasi dengannya untuk mewadahi pembengkakan jumlah anggota. Pada periode 1960-1964 Partai NU mendirikan PMII, Misi Islam, Lesbumi, Sernemi, dan HPMI (Fealy, 2009).

Salah satu pengaruh dari berbagai perubahan tersebut adalah munculnya jarak budaya di dalam Partai NU. Hal itu dapat dilihat dengan menyandingkan kehidupan elit (Scott, 2013) NU yang tinggal di perkotaan terutama di Jakarta dengan basis masanya yang tinggal di pedesaan. Djamaluddin Malik dan Subhan ZE merupakan contoh elit NU yang secara kebudayaan sangat jauh dengan mainstream masa NU. Meskipun begitu kehadirannya tetap berpengaruh dan dibutuhkan. Djamaluddin Malik merupakan tuan rumah yang ramah dan murah hati yang membuka rumahnya untuk para pengurus yang ingin mengadakan pertemuan. Subhan ZE juga senang menjamu dan menarik tokoh dari berbagai kalangan seperti pengusaha Tionghoa, cendekiawan, tokoh mahasiswa, serta pejabat tinggi militer untuk masuk ke dalam lingkaran pergaulannya. Reaksi Partai NU terhadap hal tersebut sangat bervarisi, KH. Wahab Chasbullah dan Idham Chalid membanggakan hal itu karena Partai NU mampu menarik beragam kalangan. Di sisi lain juga terdapat kelompok yang menilai hal tersebut perlu dicela secara moral karena perhatian Partai NU terhadap kepentingan keagamaan telah berbelok, sementara mereka juga terbenam dalam kehidupan perkotaan yang materialistis dan rendah secara moral (Fealy, 2009).

Di tengah situasi semacam itulah wacana Khittah NU muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada tahun 1959. Saat Partai NU menyelenggarakan Muktamar ke-22 di Jakarta pada 13-18 Desember 1959, KH. Achyat Chalimi, salah seorang perwakilan dari cabang Mojokerto mengusulkan agar NU kembali lagi menjadi organisasi keagamaan. Menurut penilaiannya, peran NU sebagai partai politik yang seharusnya mengusung kepentingan bersama sudah hilang karena telah dipegang secara perorangan guna mencapai kepentingan pribadi (Feillard, 2017) (Ridwan, 2020). Jika dicermati, usulan KH. Achyat Chalimi tersebut tidak sepenuhnya berupa penolakan terhadap keterlibatan NU dalam politik praktis. Usulan tersebut tampak lebih didasarkan pada pandangannya yang tidak membenarkan peran Partai NU dipegang secara perorangan, karena dengan dilakukannya hal itu peran partai sebagai wadah bersama telah hilang. Meski tidak

mengarah secara langsung, fakta tersebut relatif dapat dibenarkan karena saat itu superordinasi Partai NU sedang dipegang oleh KH. Wahab Chasbullah (Fealy, 1997) yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa Partai NU memang tengah dipegang secara perorangan. Selain itu, Idham Chalid selaku Ketua Tanfidziyah juga menolak untuk meninggalkan politik praktis meskipun tetap mengakui adanya kelemahan di bidang sosial (Feillard, 2017).

Usulan ditolak dan NU masih berdiri sebagai partai politik. Tentangan terhadap usulan diajukan oleh para pendukung yang menghendaki NU untuk tetap menjadi partai politik. Jika diperhatikan, saat itu NU memang sedang getol berpolitik praktis sehingga usulan untuk meninggalkannya masih terasa aneh. Apalagi situasi sosialnya cenderung mendorong masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya melalui politik praktis (Ridwan, 2020). Setelah Muktamar Jakarta 1959, pandangan yang senada dengan usulan KH. Achyat Chalimi tersebut masih sempat bergulir. Misalnya dalam forum Konferensi Ulama 1960, cabang Kudus meminta agar keterlibatan ulama dalam jabatan pemerintahan ada aturannya. Dua tahun kemudian, desakan agar NU tidak berpolitik praktis muncul lagi dalam Muktamar ke-23 di Solo 1962 yang memaksa Idham Chalid melakukan pembelaan dengan menjelaskan urgensi keterlibatan NU dalam politik praktis. Pada akhirnya, wacana Khittah NU masih belum mendapat tempat dan usaha kelompok yang menghendaki agar NU tidak berpolitik praktis juga gagal. Namun usaha tersebut mampu untuk, paling tidak, mendorong digiatkannya kembali aktivitas sosial dan keagamaan (Fealy, 2009).

Wacana Khittah NU sempat tidak terdengar dalam Muktamar Bandung 1967 (Haidar, 2011). Saat itu Partai NU sedang berada di tengah proses transisi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Proses transisi tersebut diiringi dengan perpindahan dukungan Partai NU dari Orde Lama ke Orde Baru. Hal itu dilakukan karena Soekarno dinilai cenderung berpihak pada PKI, padahal di dalam Partai NU suara anti PKI cukup kuat. Di sisi lain, Soekarno juga cenderung memilih sikap yang bertentangan dengan pihak militer, oleh karena itu dukungan terhadapnya dinilai tidak layak untuk dipertahankan karena elemen di dalam Partai NU juga sedang bekerja sama dengan pihak militer untuk bersama-sama melawan PKI. Kemudian kelompok yang sejak awal mendukung Soekarno berubah menjadi seiring dan sejalan dengan kelompok penentang demokrasi terpimpin dan konsep Nasakom Soekarno, hal ini membuat peta kekuatan bergeser dan berdampak pada sikap Partai NU yang memutuskan untuk mengalihkan dukungannya kepada Orde Baru (Fealy, 1997). Sementara di sisi lain suara kelompok yang meminta NU untuk tidak berpolitik praktis tidak terdengar sama sekali. Wacana Khittah NU sempat muncul lagi di tahun berikutnya ketika Kyai Bisri Syansuri menyampaikan agar rapat pengurus partai NU pada bulan Agustus 1968 menjadikan Khittah NU sebagai sumber inspirasi. Kyai Bisri Syansuri juga membacakan pidato pembukaan rapat berbahasa Arab yang disampaikan KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 yang dinilai sangat simbolis (Feillard, 2017).

Pada periode 1968-1971 hubungan Partai NU dengan pihak militer berubah. Hubungan yang semula berbentuk kerja sama dan saling akomodasi tidak berlanjut menjelang pemilu 1971 karena pada masa kampanye, pihak militer secara terang-terangan mendukung Golkar. Sebenarnya Partai NU percaya kalau pemerintah tidak akan mampu berbuat banyak di daerah tanpa melakukan kerja sama dengannya, termasuk ketika berniat membuat lembaga-lembaga. Sikap percaya diri Partai NU tersebut didukung dengan hubungan sebelumnya dengan pihak militer. Namun dengan perubahan sikap pihak militer di atas, Partai NU tentu dirugikan. Padahal Orde Baru yang disokong Golkar sedang gencar melakukan berbagai usaha untuk memenangkan pemilu. Selain itu terdapat juga peralihan dari kubu Partai NU ke kubu Golkar, misalnya Haji Ani dari Jombang, Kyai Musta'in Ramli ketua persatuan tarekat dari pesantren Darul Ulum Jombang, Kyai Zubair dari Salatiga mantan Rais Am Jawa Tengah, Kyai Sofwan dari Jawa Tengah, Karim Hasyim putra KH. Hasyim Asy'ari, Kyai A. Aziz Bishri putra Kyai Bisri Syansuri serta pendiri Majelis Dakwah Islam Islamiyah, dan Wahib Wahab putra KH. Wahab Chasbullah. Perpindahan ke Golkar pada 1971 tersebut seringkali dilakukan oleh tokoh Partai NU yang tidak memiliki pesantren dan bukan merupakan

tokoh penting di dalam Partai NU. Oleh karena itu, seperti partai-partai lain yang bersaing dengan Golkar, Partai NU juga merasakan betapa beratnya persaingan tersebut karena harus berhadapan langsung dengan pihak militer, ditambah dengan peralihan beberapa tokohnya yang memutuskan pindah ke Golkar (Feillard, 2017).

Hasilnya dapat dilihat pada pemilu 1971. Partai NU menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 18,7% yang selisihnya jauh di bawah Golkar sebagai pemenang dengan perolehan suara 62,8%. Pemilu semakin meningkatkan rasa permusuhan antara pihak militer dengan kelompok radikal di dalam Partai NU yang telah dimulai sejak 1968. Kelompok radikal semakin membesar dengan kemarahan yang dipicu oleh sikap intimidatif yang diterimanya selama pemilu (Feillard, 2017). Pada tahun pemilu tersebut, wacana Khittah NU muncul lagi dalam Muktamar ke-25 di Surabaya pada 1971. Menariknya, wacana tersebut disampaikan sendiri oleh Rais Am KH. Wahab Chasbullah melalui pidato pembukaan muktamar (Ridwan, 2020). Hal ini menarik karena menampilkan berbaliknya sikap KH. Wahab Chasbullah yang sebelumnya membawa NU menjadi partai politik dan gencar berpolitik praktis sejak 1952. Sayangnya belum ditemukan alasan mengapa terjadi perubahan sikap dalam diri KH. Wahab Chasbullah. Terlepas dari penyebab dari perubahan sikap KH. Wahab Chasbullah tersebut, lagi-lagi Khittah NU belum memperoleh tempat karena peserta muktamar cenderung memilih NU untuk tetap menjadi partai politik yang sekaligus menunjukkan bahwa superordinasi KH. Wahab Chasbullah telah luntur karena kehendaknya tidak lagi menjadi kehendak partai sebagaimana situasi yang terjadi di tahun 1952 (Fealy, 1997). Selain memang saat itu sedang terjadi ketegangan dalam pemilihan ketua umum NU antara Idham Chalid dan Subhan ZE yang menyebabkan wacana Khittah NU tidak memperoleh tanggapan dengan baik (Ridwan, 2020).

Partai NU Melebur dalam PPP: 1973-1984

Setelah Golkar memperoleh kemenangan dalam pemilu, pemerintah menerapkan penggabungan parta-partai politik ke dalam dua partai. Empat partai Islam yang ada yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan ke dalam PPP. Sementara lima partai nasionalis dan Kristen antara lain PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba digabung ke dalam PDI. Persoalan muncul berkaitan dengan partai politik, terdapat rancangan undang-undang yang menghendaki partai politik memiliki landasan yang seragam, yaitu Pancasila dan UUD ’45, bukan berlandaskan asas-asas lain termasuk Islam. Rancangan undang-undang tersebut ditentang oleh Partai NU karena dinilai akan menimbulkan persoalan internal yang tidak berkesudahan. Dengan penolakan tersebut, pemerintah kemudian melunak dan mengizinkan masing-masing partai politik menggunakan landasannya sendiri yang berdampingan dengan Pancasila yang diakui bersama. Dengan dibentuknya PPP pada tanggal 5 Januari 1973 (Feillard, 2017), Partai NU sebagai wadah politik tersendiri secara otomatis menjadi tidak ada. Aktivitas politik praktis NU selanjutnya disalurkan melalui PPP.

Persoalan distribusi kekuasaan muncul lagi seperti saat NU masih tergabung dengan Partai Masyumi (Bruinessen, 1994). Persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian kursi di DPR antara NU dan Parmusi. Partai NU yang perolehan suaranya mencapai 70% suara partai-partai Islam hanya memperoleh 44% kursi atau 28 kursi. Selain itu kepemimpinan eksekutif PPP juga dipegang oleh Mintareja, seorang modernis dari Parmusi, sementara NU menempati posisi yang sebatas jabatan kehormatan saja (Feillard, 2017). Kyai Bisri Syansuri, Rais Am PBNU pengganti KH. Wahab Chasbullah yang meninggal pada tanggal 29 Desember 1971 (Fealy, 1997), dijadikan sebagai ketua Majelis Syuro PPP dan Idham Chalid diangkat sebagai presidennya. Bagaimanapun juga situasi di tingkat nasional dan di tingkat daerah seringkali mengalami perbedaan. Begitupun yang terjadi dengan situasi yang dialami oleh NU dan PPP. Dibandingkan dengan situasi di tingkat nasional

sebagaimana disebut sebelumnya, situasi di tingkat daerah cenderung lebih menguntungkan NU karena ketua majelis pertimbangan PPP dan ketua koordinatornya sering diangkat dari NU (Feillard, 2017).

Situasi yang berubah juga membuat banyak hal ikut berubah. Pada masa Orde Lama, NU mengalami ketergantungan terhadap patronase. Berkat keikutsertaannya dalam pemerintahan, NU dapat memberikan berbagai pelayanan dan fasilitas kepada para pendukungnya di berbagai daerah. Sumber utama patronase NU adalah kesempatan memegang Departemen Agama dalam waktu yang lama. Tawaran pendidikan, kesempatan kerja, fasilitas berhaji, perlindungan terhadap kepercayaan serta praktek-praktek tradisionalis, dan berbagai pelayanan lain seringkali diperoleh berkat dipegangnya Departemen tersebut oleh NU. Situasi ini berbalik pada masa Orde Baru, NU dinilai mengalami kemunduran saat Departemen Agama terlepas darinya, meskipun pengaruh dari situasi baru tersebut tidak dirasakan secara langsung. Pemerintahan yang baru dibentuk setelah pemilu pertama Orde Baru memang menyerahkan kepemimpinan Departemen Agama kepada seorang modernis non-NU bernama Mukti Ali sebagai Menteri Agama. Dengan pandangan agama yang cenderung berbeda, Mukti Ali tidak dapat diharapkan begitu saja untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan para pendahulunya yang berasal dari NU (Bruinessen, 1994).

Tuntutan loyalitas tunggal yang diterapkan pemerintah kepada PNS juga dialami oleh NU. Para agen NU yang masih berada di Departemen Agama diharuskan untuk secara formal melepaskan keanggotaannya dari NU. Sebagaimana PNS lainnya, mereka diharuskan untuk bergabung dengan KORPRI, salah satu soko guru Golkar. Awalnya tidak ada kebijakan pemerintah yang secara langsung menyatakan anti terhadap NU, namun apa yang dialami NU tersebut merupakan akibat dari depolitisasi yang diterapkan oleh Orde Baru. Apapun istilah yang digunakan sebagai kebijakan oleh Orde Baru untuk menghadapi para pesaingnya, semua itu tetaplah berpengaruh terhadap kelompok manapun yang masih ada kaitannya dengan setiap kebijakan yang diterapkan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika NU berulangkali berkonfrontasi dengan pemerintah, para agen NU yang berada di Departemen Agama mengalami tekanan berat. Kemapanan dari berbagai pola patronase di dalam NU yang dalam beberapa waktu masih bisa diterapkan menjadi tidak bekerja lagi (Bruinessen, 1994). Pengaruh depolitisasi juga berdampak terhadap kegiatan-kegiatan NU. Akibat dari persaingannya dengan Golkar adalah bermunculannya berbagai keluhan, misalnya yang terjadi kepada para mubaligh yang ceramahnya dibatasi hanya boleh menyangkut masalah moral saja, sementara pembahasan yang terkait dengan politik tidak diperbolehkan (Feillard, 2017).

Pada tahun 1975, NU mengadakan konferensi besar untuk membahas situasi yang serba baru. Menteri Mukti Ali yang hadir mewakili Presiden Soeharto mengucapkan selamat atas usaha jam'iyah, penyebutan istilah yang berarti politik telah dianggap lenyap dari NU, yang telah memusatkan perhatiannya terhadap pembangunan di bidang sosial dan keagamaan. Ucapan selamat dari Mukti Ali tersebut bukan hanya sebatas pemanis dalam sambutannya karena memang para Kyai nyatanya juga memutuskan untuk mempergiat usaha-usaha di bidang sosial sembari melakukan penyesuaian diri dengan identitas "baru" NU sebagai organisasi keagamaan setelah kegiatan politik pratisnya mulai disalurkan melalui PPP. Meskipun, para agen politik NU tetap berusaha mempertahankan peran utama NU dalam PPP. Konbes yang mendapat sambutan pemerintah tersebut memberikan legitimasi baru bagi NU yang seringkali mengalami kesulitan karena berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru. Setelah konbes berakhir, pidato sambutan Mukti Ali yang berisi dukungan terhadap NU sebagai jam'iyyah tersebut digandakan untuk kemudian dibagi-bagikan ke daerah. Berkat hal ini ketegangan dengan pemerintah mulai berkurang, meskipun masih terdapat rasa permusuhan yang malah lebih sering muncul dari PNS setempat dibandingkan yang muncul dari pemerintah pusat (Feillard, 2017).

Selang beberapa tahun, kadar persaingan meningkat lagi di tahun pemilu 1977. Perolehan kursi Islam politik di DPR bertambah lima kursi, meningkat dari 27% menjadi 29% suara. Meskipun

begitu, peningkatan ini tidak bermanfaat bagi NU karena harus kehilangan dua kursinya untuk dibagikan kepada tiga kelompok Islam yang lain. Sebagai gantinya, NU mendapat kompensasi untuk menempati jabatan-jabatan politik seperti wakil ketua DPR. Golkar yang merasa khawatir dengan peningkatan 2% suara tersebut mulai berusaha menarik suara kelompok Islam secara lebih terorganisir. Pada bulan Juli 1978, Golkar mendirikan badan dakwah sendiri yaitu Majelis Dakwah Islamiyah Golkar yang erat bekerja sama dengan GUPPI. Di tahun berikutnya, Orde Baru melakukan pelembagaan penataran P4 yang merupakan kependekan dari Pedoman Penghayatana dan Pengamalan Pancasila. P4 ditolak oleh NU, penyebabnya bukan karena bertentangan dengan keyakinannya, namun lebih berdasar pada kekhawatiran terhadap posisi P4 di masa mendatang yang berpotensi dapat menggantikan agama dan menjadi dasar sekaligus pedoman untuk segala kegiatan. Misalnya, umat Islam akan beribadah berdasar kepatuhannya kepada sila pertama Pancasila, bukan karena kepatuhan terhadap agama (Feillard, 2017). Pada tanggal 5-11 Juni 1979 NU mengadakan Muktamar ke-26 di Semarang (Nakamura, 1997). Berbagai ketidakpuasan muncul dalam muktamar tersebut. Beberapa di antaranya berupa keluhan karena tekanan yang diderita PNS serta pengusaha yang secara administrasi masih mengalami ketergantungan ketika berusaha mendapatkan tender pekerjaan umum, tugas-tugas utama NU yang bersifat sosial maupun pendidian juga telah diabaikan dimana jika hal itu dilanjutkan dalam jangka panjang dikhawatirkan NU bisa jadi kehilangan akarnya di masyarakat, keluhan berikutnya terkait dengan kepemimpinan NU di Jakarta yang dinilai tidak mampu mempertahankan diri ketika berhadapan dengan Parmusi yang berhasil menguasai PPP, selain itu NU juga dinilai terlalu tunduk pada kemauan pemerintah. Salah satu akibatnya adalah Idham Chalid tidak lagi mendapat dukungan dari Rais Am Kyai Bisri Syansuri dan salah seorang Kyai berpengaruh dari Situbondo yaitu Kyai As'ad Syamsul Arifin. Idham Chalid dinilai cenderung gemar merahasiakan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh umum dan tidak memberikan dukungan ketika cabang-cabang NU menderita tekanan dari pemerintah sehingga menyebabkan beberapa cabang mengalami kehancuran, terutama pada masa kampanye pemilu 1971 dan 1977. Suara kelompok yang menolak NU berpolitik praktis banyak bermunculan dalam muktamar ini, termasuk sebuah pernyataan dari seorang perwakilan dari Sumatra Barat yang berkata "tikus-tikus yang disebut politikus" ini harus meninggalkan kepemimpinan NU sekarang juga (Feillard, 2017).

Ketidakpuasan juga dirasakan oleh kelompok baru dari generasi muda yang menginginkan NU kembali pada fungsi sosial-keagamaan. Mereka antara lain Abdurrahman Wahid dan Fahmi Saifudin yang didukung oleh para Kyai karena merasa disingkirkan oleh para agen politik yang juga punya pandangan tersendiri terkait haluan NU karena telah secara langsung melihat akibat dari diabaikannya tugas sosial-keagamaan. Dari berbagai rentetan peristiwa tersebut, akhirnya muktamar ini menyerukan ajakan untuk kembali pada kegiatan sosial-keagamaan dan menegaskan supremasi Kyai yang telah ditinggalkan. Ajakan tersebut sebenarnya mendapat sambutan, namun tidak terdapat perubahan yang signifikan karena Idham Chalid masih mendapat kepercayaan lagi untuk menjadi Ketua Tanfidziyah bersama dengan terpilihnya lagi sebagian besar agen NU yang berkecimpung di dalam politik praktis. Hal ini mengejutkan bagi para penentang yang dalam berbagai reaksinya ditampilkan dengan nada penolakan (Feillard, 2017). Di sisi lain, pemerintah juga lebih menyukai Idham Chalid yang dinilai lebih lunak dibandingkan Ahmad Sjaichu yang sulit ditebak dan lebih vokal sebagai pilihan alternatif tunggal terkuat selain Idham Chalid (Bruinessen, 1994). Pada akhirnya, fakta masih berpihak pada keterlibatan NU dalam politik praktis. Meskipun sebelum diadakannya muktamar, wacana Khittah NU sudah beredar dalam bentuk tulisan berjudul Khittah Nahdliyah yang dikarang oleh KH. Achmad Siddiq (Ridwan, 2020).

Wacana Khittah NU semakin memperoleh tempat setelah diselenggarakannya Munas Alim Ulama NU di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus-2 September 1981. Munas tersebut

memutuskan untuk memilih KH. Ali Maksum untuk menggantikan Kyai Bisri Syansuri (Ridwan, 2020) yang meninggal pada April 1980. KH. Ali Maksum terpilih karena kedalaman pengetahuannya yang diakui oleh semua Kyai, selain memang terdapat banyak usaha yang dilakukan untuk menjadikan dirinya sebagai Rais Am. Usaha tersebut dilakukan oleh kelompok yang menilai dirinya merupakan tokoh ideal untuk memimpin NU selama masa transisi. Di antara para pendukung KH. Ali Maksum terdapat tiga pemuda NU yang pernah belajar kepadanya dalam waktu yang berbeda yaitu Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifudin, dan Mustofa Bisri. Ketiganya termasuk bagian dari keluarga elit NU yang kemudian menjadi pembaru dan aktivis NU di era 1980-an, mereka meyakini bahwa NU memerlukan perubahan drastis agar semakin relevan dengan pendukung tradisionalnya. Namun peran paling krusial atas terpilihnya KH. Ali Maksum dilakukan oleh Kyai Achmad Siddiq yang menyatakan pendapatnya dalam musyawarah bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi Rais Am selain KH. Ali Maksum. Sama seperti kalangan muda, KH. Achmad Siddiq juga menilai bahwa NU sudah terlalu lama berjalan di jalur yang salah dan menyimpang dari apa yang dinilainya sebagai semangat asli NU (Bruinessen, 1994).

Pada periode 1982-1983 NU semakin bergolak. Pergolakan tersebut terjadi di wilayah internal NU yang juga saling terkait dengan pergolakan di wilayah ekternalnya. Pertentangan NU dengan PPP yang diketuai John Naro dari Parmusi yang menggantikan Mintareja, ketua sebelumnya, muncul lagi menjelang pemilu 1982. John Naro menyingkirkan banyak politisi kawakan NU dari daftar calon DPR PPP. Hal ini memicu reaksi keras dari para pemimpin senior NU, berkebalikan dengan hal itu Idham Chalid selaku ketua yang tentunya diharapkan mampu melakukan sesuatu malah tidak melakukan pembelaan sama sekali terhadap keberadaan organisasinya. Barangkali inilah salah satu penyebab pada tanggal 2 Mei 1982 beberapa Kyai senior NU mendatangi dan meminta Idham Chalid di Jakarta untuk mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Kyai senior tersebut antara lain KH. As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo, KH. Ali Maksum dari Krapyak, KH. Machrus Aly dari Lirboyo, dan KH. Masykur dari Jakarta. Mereka dinilai mampu secara kolektif membuat klaim bahwa telah mewakili suara mayoritas Kyai NU. Kyai senior tersebut menyampaikan kepada Idham Chalid bahwa kepemimpinannya sudah tidak diinginkan lagi dan tidak dapat dipertahankan. Mendengar apa yang disampaikan kepadanya, Idham Chalid tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya dengan menandatangani surat pengunduran diri dan menyerahkan kewenangannya kepada KH. Ali Maksum. Agar tidak menimbulkan kebisingan menjelang pemilu yang dilaksanakan pada 4 Mei 1982, diputuskan bahwa pengumuman pengunduran diri tersebut akan disampaikan pada 6 Mei 1982. Meskipun berusaha untuk dirahasiakan, berita tersebut akhirnya tetap tersebar karena terjadi kebocoran yang menggemparkan warga NU dan lingkungan politik yang lebih luas (Nakamura, 1997).

Dari peristiwa tersebut NU terbelah menjadi dua kubu. Sebelumnya NU memang sudah terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki keragaman pandangan. Namun pada 1982, perbedaan pandangan tersebut membuat NU benar-benar terbelah menjadi dua kubu yang sering disebut kubu Cipete dan Situbondo. Kubu Cipete terdiri dari Idham Chalid bersama para pendukungnya, sementara kubu Situbondo dipimpin oleh keempat Kyai senior yang disebut sebelumnya. Berbagai pernyataan yang saling bertentangan muncul dari kedua kubu tersebut untuk sama-sama meraih dukungan (Nakamura, 1997). Persaingan juga dilakukan dalam rangka menarik dukungan dari pemerintah. KH. As'ad Syamsul Arifin yang sejak pertengahan 1983 sudah menunjukkan superordinasinya yang melebihi Rais Am KH. Ali Maksum dinilai lebih punya kesempatan untuk membuat NU secara keseluruhan menerima tuntutan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah memilih untuk memberikan dukungan penuhnya kepada Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan oleh kubu Situbondo (Bruinessen, 1994) pada 18-21 Desember 1983 (Nakamura, 1997). Sebelumnya kubu Cipete juga berusaha menunjukkan bahwa Idham Chalid masih mempunyai banyak pendukung. Mereka mengundang seluruh pengurus wilayah untuk menghadiri rapat paripurna bersama pengurus pusat di Jakarta beberapa minggu sebelum Munas Situbondo.

Para delegasi dari 22 provinsi telah tiba di jakarta, namun pemerintah menolak memberikan izin penyelenggaraannya sehingga rapat dilaksanakan di tempat terpisah. Kubu Cipete mengeluarkan pernyataan untuk menarik dukungan pemerintah bahwa mereka menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Namun pemerintah tidak memberikan legitimasi kepadanya, sehingga akhirnya mereka membatalkan rencana untuk menyelenggarakan muktamar ke-27 (Bruinessen, 1994).

Di sisi lain kubu Situbondo berhasil menyelenggarakan munas dan muktamar ke-27 yang keduanya diselenggarakan di Situbondo. Keputusan berpengaruh dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Situbondo 1983 dan Muktamar Situbondo 1984. Munas menghasilkan beberapa keputusan penting. Di antara keputusannya adalah pemulihan Khittah NU 1926, deklarasi hubungan Pancasila dan Islam serta rekomendasi larangan rangkap jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Keputusan munas tersebut menunjukkan bahwa rancangan tujuan baru sedang disusun bagi NU. Sebelumnya tulisan KH. Achmad Siddiq berjudul Khittah Nahdliyah yang telah beredar menjelang Muktamar ke-26 di Semarang pada 1979 serta tulisannya yang lain dengan judul Pemulihan Khittah NU 1926 telah menjadi bahan diskusi resmi yang pada akhirnya banyak dikutip dalam keputusan-keputusan munas. Kiprah KH. Achmad Siddiq yang tulisannya mewarnai munas serta Abdurrahman Wahid yang ditunjuk sebagai ketua panitia mendapatkan pengakuan secara luas dan memantapkan posisi mereka yang di tahun berikutnya, pada Muktamar Situbondo 1984 terpilih sebagai Rais Am dan Ketua Tanfidziyah. Terpilihnya KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Am dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Tanfidziyah menjadi penanda regenerasi yang signifikan dalam kepemimpinan tertinggi NU. Kepiawaian dan keberaniannya memberikan sumbangan yang besar dalam mempercepat proses perubahan NU (Nakamura, 1997).

Khittah NU Menjadi Keputusan Muktamar Situbondo 1984

Wacana Khittah NU akhirnya mendapat tempat utama di tahun 1984 setelah melalui berbagai dinamika dan proses sosial selama 25 tahun 1959-1984. Melalui Muktamar ke-27 yang diselenggarakan di Situbondo, NU memutuskan untuk menarik diri dari politik praktis. Selain itu, muktamar juga menghasilkan beberapa keputusan penting lain seperti: menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang kemudian menjadi landasan dasar NU, pemulihan keutamaan kepemimpinan Kyai dengan menegaskan supremasi Syuriah atas Tanfidziyah dalam status dan hukum, serta pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang memberi penekanan pada bidang-bidang non-politik (Nakamura, 1997). Hal ini selain berpengaruh secara internal, tentunya turut berpengaruh terhadap berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai proses sosial bersama dengan NU.

Alasan NU Menarik Diri dari Politik Praktis

Faktor utama yang menyebabkan diambilnya keputusan Khittah NU adalah karena NU dinilai telah mengalami penyimpangan. Penyimpangan tersebut mengacu pada perilaku, cara-cara bertindak, sikap, keyakinan, dan gaya yang melanggar norma-norma, aturan, etika, dan harapan masyarakat (Scott, 2013)—dalam hal ini pengurus dan warga NU. Peneliti dengan sudut pandang makro sosiologi menempatkan posisi NU sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan karena esensi dari setiap persoalan yang berkaitan dengan wacana Khittah NU adalah pandangan kelompok di dalam NU yang menengok ke belakang terhadap blue print NU sebagai patokan. Ketika didirikan, NU memang merupakan organisasi sosial keagamaan sehingga cara berpikir dan gerakannya diharapkan selalu sesuai dengan koridor tersebut. Sementara sejak kemerdekaan, NU memilih terlibat aktif di dalam politik praktis yang menyebabkan cara berpikir dan gerakannya berubah. Selain itu NU juga dinilai telah abai terhadap concern utamanya karena terlalu larut dalam aktivitas

politik praktis. Meskipun sebenarnya juga tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai penyimpangan karena dari sudut pandang mikro sosiologi, keputusan untuk terlibat aktif dalam politik praktis tersebut diambil saat para pendiri NU seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Chasbullah, dan KH. Bisri Syansuri masih hidup bahkan terlibat aktif sebagai pemain dalam waktu yang tidak hanya sesaat, kecuali KH. Hasyim Asy'ari yang telah meninggal ketika baru beberapa tahun aktif sebagai ketua dewan syura Partai Masyumi. Penyimpangan lain juga dapat dilihat dari posisi Syuriah yang kian hari semakin tersisih oleh peran para politisi. NU sebagai perkumpulan para Kyai yang selayaknya menyerahkan peran utama organisasi kepada mereka, malah memberikan panggung utamanya secara signifikan kepada para politisi ketika NU sedang aktif dalam politik praktis. Hal itu membuat geram para Kyai karena moral organisasi sudah mengabaikan arahan mereka. Terlebih lagi kepentingan politik yang hendak dicapai tidak selalu mementingkan urusan organisasi secara keseluruhan karena lebih diutamakannya kepentingan pribadi.

Faktor lain yang juga mendorong diambilnya keputusan Khittah NU adalah situasi eksternal NU. Ketika tergabung dalam Partai Masyumi dan PPP, NU seringkali tersingkir dari partai baik secara posisi maupun peran. Posisi dan peran signifikan yang diharapkan didapatkan oleh NU selalu dikerdilkan bahkan dipangkas hingga habis sehingga tumpukan ketidak setujuan memuncak dengan sikap penarikan diri NU dari kedua partai tersebut. Di sisi lain meskipun NU dinilai cukup berhasil dengan kemampuannya menempati posisi ketiga dalam pemilu 1955 dan kedua dalam pemilu 1971 saat sedang menjadi partai politik tersendiri, namun juga terdapat penilaian bahawa masih ada ketimpangan antara harapan teguhnya cara berpikir dan gerakan NU dengan realitas sosial-politik yang menuntutnya untuk menampung berbagai kalangan guna mengisi kekurangan tenaga ahli. Bahkan beberapa hasil rekrutmen NU malah memiliki kehidupan pribadi yang tidak sesuai bahkan jauh dari cara berpikir dan gerakannya. Selain itu juga terdapat peran pemerintah yang juga turut mempengaruhi berbagai situasi yang harus dihadapi NU. Misalnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Orde Lama yang menyebabkan suara NU terbelah serta represi yang dilakukan oleh Orde Baru yang juga cukup berpengaruh terhadap NU karena posisinya yang sedang berusaha bertahan dan tumbuh mengalami banyak tentangan darinya.

Oleh karena semua persoalan yang dihadapinya saat itu, pada akhirnya NU memilih untuk menetapkan Khittah NU sebagai keputusan muktamar. Meskipun tidak ada jaminan bahwa NU akan terhindar dari persoalan-persoalan baru yang lain, namun paling tidak NU sudah memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang sedang dihadapinya. Begitulah realitas yang harus dilalui NU, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, untuk tetap bertahan bahkan mampu untuk terus berkembang hingga saat ini. Uraian mengenai berbagai faktor tersebut ditafsirkan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap temuan fakta-fakta tentang NU pada periode 1945-1984. Terutama tafsiran terhadap temuan fakta terkait faktor-faktor yang mendorong NU pada akhirnya membuat keputusan tersebut sejak Khittah NU masih muncul pertama kali sebagai wacana pada 1959 dan dinamika internal-eksternal yang dialami NU sejak terlibat aktif dalam politik praktis pada 1945 hingga perhelatan Mukatamar Situbondo pada 1984.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan diri NU dari politik praktis merupakan keputusan yang berdasar. NU telah mengalami berbagai peristiwa yang merugikan dirinya sendiri dengan terlibat dalam politik praktis. Posisi berhadap-hadapan dengan berbagai pihak, baik dengan sesama anggota partai maupun dengan pihak di luar partai membuat NU terlibat terlalu jauh dalam pertikaian yang berulang dan tidak ada habisnya. Selain itu urusan-urusan pokok yang menjadi dasar didirikannya NU juga menjadi terbengkalai karena terlalu dalam terlibat dalam urusan politik praktis. Dengan menarik diri dari politik praktis, peluang kerja sama dengan berbagai pihak menjadi semakin terbuka. Meskipun begitu, urusan NU tidak hanya berhenti sampai disini saja. Terdapat tugas-tugas baru seperti mengubah pola pikir dan kerja

organisasi yang sudah menanti. Hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena butuh waktu untuk meyakinkan bahwa keputusan tersebut layak diterima kepada begitu banyaknya jumlah anggota NU yang pemikirannya juga majemuk.

REFERENSI

Abdullah, I. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdulsyani. (2002). *Sosiologi: Sekmatika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Alrianingrum, A. M. (2014). Peran Politik NU Tahun 1952-1955. *Avatara,* Vol. 2, No. 3, 628-636. Diambil kembali dari https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/9262

Barton, G. F. (Penyunt.). (1997). T*radisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara.* (A. Suaedy, Penerj.) Yogyakarta: LKiS.

Bashri, Y. (2020). *Dinamika Politik NU era Presiden Gus Dur*. Yogyakarta: Bildung.

Berger, P. L. (1991). *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*. (Hartono, Penerj.) Jakarta: LP3ES.

Bruinessen, M. V. (1994*). NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. (F. Wajidi, Penerj.) Yogyakarta: LKiS.

Daman, H. R. (2011). *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media.

DZ, A. M. (2011). *Piagan Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta:: Setjen PBNU-NU Online.

Fealy, G. (2009). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. (M. A. Farid Wajidi, Penerj.) Yogyakarta: LKiS.

Feillard, A. (2017). *NU Vis-à-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna di Tengah Prahara*. (L. d, Penerj.) Yogyakarta: Basabasi.

Haidar, M. A. (2011). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik.*

Sidoarjo: Al Maktabah.Ida, L. (1996). *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosial Klasik dan Modern 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosial Klasik dan Modern 2*. .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah Edisi Kedua.* Yogyakarta: Tiara Wacana

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Latif, K. M. (2019). *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur.

Muhajir, A. (2007). *Idham Chalid Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Muzadi, K. A. (2006). *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista.

Nakamura, M. (1997). "Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979". Dalam G. F. (eds.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (hal. 59). Yogyakarta: LKiS.

Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Northcott, M. S. (2012). *Pendekatan Sosiologis.* Dalam P. Connolly (Penyunt.), Aneka Pendekatan Studi Agama (I. Khoiri, Penerj., hal. 271). Yogyakarta: LKiS.

Nottingham, E. K. (1985). *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. (A. M. Naharong, Penerj.) Jakarta: CV. Rajawali.

Ricklefs, M. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (T. P. Serambi, Penerj.) Jakarta: Serambi.

Ridwan, N. K. (2020). *Ensiklopedia Khittah NU 1: Sejarah Pemikiran Khittah NU*. Yogyakarta: DIVA Press.

Ridwan, N. K. (2020). *Ensiklopedia Khittah NU 2: Dinamika Jam'iyyah*. Yogyakarta: DIVA Press.

Ridwan, N. K. (2020). *Ensiklopedia Khittah NU 3: NU, Politik, & Kebangsaan (1914-2019)*. Yogyakarta: DIVA Press.

Ridwan, N. K. (2020). *Ensiklopedia Khittah NU 4: NU dan Tokoh-Tokoh Penting*. Yogyakarta: DIVA Press.

Saleh, Z. A. (2013). *Soekarno dan NU Titik Temu Nasionalisme*. Yogyakarta: LKiS.

Scott, J. (2013). *Sosiologi The Key Concepts*. (Tim Penerjemah Labsos FISIP UNSOED, Penerj.) Jakarta: Rajawali Pers.

Shodiq, M. (2004). *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan KH. Hasyim Muzadi*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur.

Sitompul, E. M. (1989*). Nahdlatul Ulama dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-Satunya Asas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Subhan, H. S. (2012). *Buku I Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista.

Subhan, H. S. (2012). *Buku II Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista.

Sumarno, M. A. (2015). Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960): Konflik dan Keluarnya NU Dari Masyumi. *Avatara,* Vol. 3, No. 3, 487-594. Diambil kembali dari https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/